



2	1	0	1	0	06	Pegadaian Mebel	Jumlah Paket Mebel	Jumlah/Paket Mebel yang disediakan	Unit	N/A	2 Paket	-	2 Paket	1.800.000	2 Paket	7.300.000	2 Paket	8.250.000	2 Paket	10.000.000	2 Paket	15.000.000		
2	1	0	1	0	07	Pegadaian Aset Tetap Lainnya	Jumlah Tanah yang disediakan	Jumlah Unit Aset tetap lainnya yang disediakan	Unit	N/A	500 Meter Persegi	2	500 Meter Persegi	50.000.000	500 Meter Persegi	70.300.750	500 Meter Persegi	200.000.000	500 Meter Persegi	300.000.000	500 Meter Persegi	500.000.000		
2	1	0	1	0	08	Pegadaian Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	N/A	1 Unit	-	1 Unit	10.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	610.000.000		
2	1	0	1	0	10	Pegadaian Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	N/A	2 Komputer/Laptop dan 2 Printer	-	2 Komputer/Laptop dan 2 Printer	15.000.000	2 Unit AC, 2 Unit TV LED 42"	42.800.000	2 Unit TV LED 64"	25.000.000	1 Unit Ransing Tan-2 laptop	8.000.000	2 Komputer/Laptop dan 2 Printer	30.000.000		
2	1	0	1	0	11	Pegadaian Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	N/A	Tempel Pukul RD	-	Ruang rapat	30.400.000	Ruang Pertemuan & PTSP dan lain-lain	44.000.000	Tempel jamkr RD	87.000.000	Ruang Kantor dan Ruang	100.000.000	Ruang kade	150.000.000		
2	1	0	1	0		Penyediaan Jasa Perundingan Urusan Pemerintahan Daerah	Pembayaran Terakumulasi Jasa Perundingan Urusan Pemerintahan Daerah			12 bulan	100%	141.195.000	100%	134.725.000	100%	159.385.000	100%	186.556.000	100%	204.506.000	100%	320.506.000	Selalu	
2	1	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	25.400.000	12 Bulan	26.500.000	12 Bulan	28.000.000	12 Bulan	30.100.000	12 Bulan	32.000.000	12 Bulan	40.000.000		
2	1	0	1	0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	35.200.000	12 Bulan	35.537.000	12 Bulan	40.537.000	12 Bulan	42.000.000	12 Bulan	52.000.000	12 Bulan	58.000.000		
2	1	0	1	0	03	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	8.076.000	12 Bulan	9.500.000	12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	18.000.000		
2	1	0	1	0	04	Penyediaan Jasa Kebersihan Umum Kantor	Jumlah tenaga Swakelola Tenaga IT, Supir, dan Kebersihan perkantoran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	90.000.000	12 Bulan	70.500.000	12 Bulan	82.200.000	12 Bulan	105.100.000	12 Bulan	108.500.000	12 Bulan	108.500.000	12 Bulan	204.000.000
2	1	0	1	0		Penyediaan Jasa Perumahan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Pembayaran Terakumulasi Pemeliharaan Bangun Milik Daerah			12 bulan	100%	84.228.000	100%	104.128.000	100%	100.788.700	100%	200.000.000	100%	400.000.000	100%	600.000.000		
2	1	0	1	0	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah Kandang Perumahan Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang disediakan dan dipelihara dan dipajatkan Pajaknya	Unit	12 bulan	12 Bulan	28.000.000	12 Bulan	27.000.000	12 Bulan	30.500.000	12 Bulan	31.000.000	12 Bulan	40.000.000	12 Bulan	48.000.000		













3	3	3	3	3	3	04	Koordinat, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah DDM yang disertifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Industri	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	200.000,00	1 Dokumen	200.000,00	1 Dokumen	200.000,00	Industri	
3	3	3	3	3	3	05	Koordinat, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Industri dan Pemasangan Perangkat Masyarakat	Persentase pembangunan sarana DDM colokan dan Jumlah Sarana DDM yang Dirombakkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Industri dan Pemasangan Perangkat Masyarakat	Dokumen	30%	1 surat	14.947,38 9.281	1 surat	13.013,08 8.880	2 surat	14.139,51 6.498	1 surat	14.257,39 6.647	2 surat	13.955,23 1.725	2 surat	13.303,86 1.710	Industri	
3	3	3	3	3	3	08	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen yang disertifikasi	Jumlah Dokumen Diikuti Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000,00 0	1 Dokumen	50.000,00 0	1 Dokumen	50.000,00 0	1 Dokumen	50.000,00 0	Industri	
3	3	3	3	3	3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		Peningkatan jumlah Industri kecil dan menengah yang bersertifikasi			sertifikat 1	sertifikat 1	sertifikat 1	sertifikat 1	sertifikat 1	182.981. 377	sertifikat 1	183.970. 407	sertifikat 1	185.008. 423	sertifikat 1	186.154. 063	sertifikat 1	184.125. 200,00	
3	3	3	3	3	3		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kawasan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Selamand Industri Nasional (SISMAN)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IPKI) Kawasan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Selamand Industri Nasional (SISMAN)			90%	90%	-	82%	-	94%	182.981. 377	90%	183.970. 407	90%	185.008. 423	100%	186.154. 063	Industri	
3	3	3	3	3	3	01	Facilitas Penemuan Kembali penelitian IUL, IUL, IUKI dan IPI Keseluruhan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SISMAN) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SISMAN)	Jumlah DDM yang bersertifikat di bidang industri	Jumlah Dokumen Fasilitas Verifikasi Telah Penemuan Kembali Reseptasi Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha sektor Industri dan atau dalam rangka perizinan usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SISMAN yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	N/A	200 Sertifikat	-	50 Sertifikat	-	50 Sertifikat	62.981,37 7	50 Sertifikat	113.970,4 07	50 Sertifikat	91.908,42 2	50 Sertifikat	120.000,0 00	Industri	

4	3	0	2	0	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IZ, IPUL, IUKI dan ZPM Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah dokumen hasil koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan perizinan di bidang Industri dalam Lingkup nasional Uraan Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Kawasan Industri Berbasis Kabupaten/Kota	Dokumen	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	58.314.003	Industri
3	3	0	4	0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Terselangnya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah</b>			1 Dokumen Raperdas	1 Dokumen Raperdas	1 Dokumen Raperdas	1 Dokumen Raperdas	48.894.413	1 Dokumen Raperdas	180.367.468	1 Dokumen Raperdas	177.133.364	1 Dokumen Raperdas	171.789.470	
2	3	0	4	0		Penyediaan Informasi Industri untuk IZ, IPUL, IUKI dan ZPM Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk IZ, IPUL, IUKI dan ZPM Kabupaten/Kota			90%	90%	90%	90%	48.894.413	90%	180.367.468	90%	177.133.364	100%	171.789.470	Industri
3	3	0	4	0	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Data Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lainnya Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.300	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	53.210.447	Industri
5	3	0	4	0	03	Desimiasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Desimiasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8.894.413	1 Dokumen	85.734.935	1 Dokumen	86.220.728	1 Dokumen	77.899.003	Industri











3	3	0	2	0	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Service dan Perangkat Industri	Jumlah ICH yang disertifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan service dan perangkat Industri	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	Industri					
3	3	0	2	0	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Perencanaan Industri dan Pemanfaatan Masyarakat	Persentase pembangunan service ICH cobat dan Jumlah Service ICH yang Ditambahkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Perencanaan Industri dan Pemanfaatan Masyarakat	Dokumen	30%	1 surat	14.847.389.201	1 surat	13.013.095.000	2 surat	14.133.326.430	2 surat	14.257.336.647	2 surat	13.995.251.721	2 surat	13.503.865.710	Industri			
3	3	0	2	0	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen yang dievaluasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Industri			
3	3	0	1	1	PROGRAM PENYERBAHAN IZIN USAHA INDUSTRI		Peningkatan jumlah Industri kecil dan menengah yang bersertifikasi			sertifikas	1	sertifikas	1	sertifikas	1	161.981.377	sertifikas	1	163.070.407	sertifikas	1	161.009.422	sertifikas	1	156.154.063	644.115.388,00
3	3	0	2	0		Pemerintah dan Usaha Industri (PUI), dan Pemusatan Usaha Industri (PMUI), dan Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Pemusatan Kawasan Industri (PKI) Kawasan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Persentase Pemerintah dan Usaha Industri (PUI), dan Pemusatan Usaha Industri (PMUI), dan Usaha Kawasan Industri (UKI) dan dan Pemusatan Kawasan Industri (PKI) Kawasan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)			90%	90%	-	92%	-	94%	161.981.377	94%	163.070.407	90%	161.009.422	100%	156.154.063	Industri			
3	3	0	3	0	01	Penerapan Kebijakan/Kelembagaan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Rekrutmen Nasional Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS)	Jumlah ICH yang bersertifikat di bidang industri	Jumlah Dokumen Fasilitas Verifikasi Teknik Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Fasilitas Teknik Perawatan Berbasis sektor Industri dan atau dalam rangka pendirian usaha untuk bidang Usaha dengan Fokus Usaha menengah Tinggi dan Tinggi Plus/ SIIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	N/A	200 Sertifikat	-	50 Sertifikat	-	50 Sertifikat	62.981.377	50 Sertifikat	113.970.407	50 Sertifikat	91.009.422	50 Sertifikat	130.000.000	Industri			

6	2	2	2	2	2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pertanian di Bidang Industri dalam Lingkup UJ, SPJ, UJK dan PJK Kawasan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pertanian di bidang Industri dalam Lingkup pertanian Usaha Industri, Perikanan Kawasan Industri dan Perikanan Perikanan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	NA	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000,00	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	70.000,00	1 Dokumen	58.134,06	Industri
3	2	2	2	2	2	04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Tersedianya data dan Informasi tentang Industri kecil dan Menengah		1 Dokumen Rampant	1 Dokumen Rampant	-	1 Dokumen Rampant	-	1 Dokumen Rampant	48.894,413	1 Dokumen Rampant	188.367,488	1 Dokumen Rampant	177.116,364	1 Dokumen Rampant	171.799,470	
1	2	2	2	2	2	01	Penyediaan Informasi Industri untuk UJ, SPJ, UJK dan PJK Kawasan Kabupaten/Kota	Penyediaan Penyediaan Informasi Industri untuk UJ, SPJ, UJK dan PJK Kawasan Kabupaten/Kota		99%	99%	-	94%	-	99%	48.894,413	99%	188.367,488	99%	177.116,364	100%	171.799,470	Industri
2	2	2	2	2	2	01	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	20.000,00	1 Dokumen	50.000,00	1 Dokumen	60.000,00	1 Dokumen	53.270,44	Industri
2	2	2	2	2	2	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SINAS	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8.894,413	1 Dokumen	85.734,93	1 Dokumen	86.220,72	1 Dokumen	77.899,02	Industri







## DPMPTP PADANG PARIAMAN

### BAB VII

#### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari:

- a. Penanaman Modal;
- b. Perindustrian

#### 7.1 Indikator Kinerja Utama

Dari kewenangan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman untuk mendukung capaian Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1

Tabel 7.1

Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman

No.	Tujuan	Indikator Tujuan (IKK)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)
1	Tujuan 1: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Nilai PDRB Sektor Industri	Meningkatnya Perekonomian masyarakat melalui Sektor Perindustrian	IK 1 : Pertumbuhan PDRB sektor Perindustrian IK 2 : Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
2	TUJUAN 1 : Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi	IK : Indeks RB
3	Tujuan 2: Meningkatkan nilai investasi /penanaman modal	Jumlah Investor	Meningkatnya nilai investasi	IK : Persentase peningkatan nilai investasi

Sumber : Dokumen Renstra DPMPTP Tahun 2021-2026

#### 7.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai RENSTRA TAHUN 2021-2026 ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir periode masa jabatan



#### DPMPTP PADANG PARIAMAN

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman secara rinci dapat dilihat pada Tabel.7.2 T.C-28 dibawah ini:



DPMPTP PADANG PARIAMAN

Tabel 7.2 T.C-28

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman**

No	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL PERIODIK AWAL TAHUN 2021	TARGET CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN REALISASI KINERJA 2021	TARGET CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN REALISASI KINERJA 2022	TARGET CAPAIAN KINERJA 2023	CAPAIAN REALISASI KINERJA 2023	TARGET CAPAIAN KINERJA 2024	CAPAIAN REALISASI KINERJA 2024	TARGET CAPAIAN KINERJA 2025	Capaian realisasi Kinerja 2025	TARGET KINERJA RENCANA ANEKADAM 2026	Kat
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>															
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Milyar		365.100	997.000	403.030	463.620	445.400		491.900		543.700		600.000	DKU
2	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
2	Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dokumen/Event	1/4	1/4	1/0	1/5	1/2	1/5		1/6		1/6		1/7	
4	Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	Angka	88	88.00	83.75	89	89.06	90		91		92		93	
5	Jumlah objek perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan diterbitkan	Objek	100.00	106.00	103.00	110.00	179.00	110.00		120		120		130	
6	Jumlah aplikasi pelayanan yang dikembangkan	Aplikasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1		1		1	
7	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Perusahaan	75.00	83.00	337.00	91.00	159.00	100.00		110		121		133	
8	Ketahanan/penurunan nilai realisasi investasi	Rp (Milyar)	55	60,50	333.00	93.00	-0.53	73,21		80,53		88,58		97,44	
9	lama proses perizinan(Rata-rata lama proses perizinan)	Hari Kerja	7 Hari	7 Hari	5 Hari	7 Hari	5 Hari	7 Hari		7 Hari		7 Hari		7 Hari	
10	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Angka	2	2	1	2	1	2		2		2		2	
11	Jumlah perda yang mendukung iklim investasi	Perda	1	1	1	1	1	1		1		1		1	
<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>															





DPMPTP PADANG PARIAMAN

12	Kontribusi ekonomi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	11,19%	11,8%	2,51%	12,6%	6,87%	13,3%		14,2%		15,0%		16,0%	DO
13	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Sentra	1	1	0,70%	1	1	1		1		1		1	
14	Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah yang bersertifikasi	Sertifikasi	Sertifikasi	Sertifikasi	Sertifikasi	Sertifikasi	95 Sertifikasi	Sertifikasi		Sertifikasi		Sertifikasi		Sertifikasi	
15	Tersedianya data dan informasi tentang industri kecil dan menengah	Dokumen Ranperda	1	1	0,70%	1	1,00	1		1		1		1	
16	Cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah Perusahaan	150,00	155,00	155,00	160,00	215,00	165		170		175		180	
17	Pertumbuhan industri	%	2,37%	2,4%	1,92%	2,42%	18,72%	2,45%		2,47%		2,5%		2,55%	



## DPMPTP PADANG PARIAMAN

### **BAB VIII**

#### **PENUTUP**

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan instansi, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman selama 5 (lima) tahun ke depan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan serta Penetapan DPA. Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan urusannya melalui laporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2021-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan



## DPMPTP PADANG PARIAMAN

Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026 termasuk indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku tanpa mengubah tujuan dan sasaran yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021- 2026.

Selanjutnya keberhasilan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Perangkat Daerah yang turut mengemban suksesnya rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder pembangunan. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

PARIAMAN, SEPTEMBER 2

**Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**= ALFIAN, S.ST. MM =**  
**Pembina, NIP. 19680504 199501 1 001**